

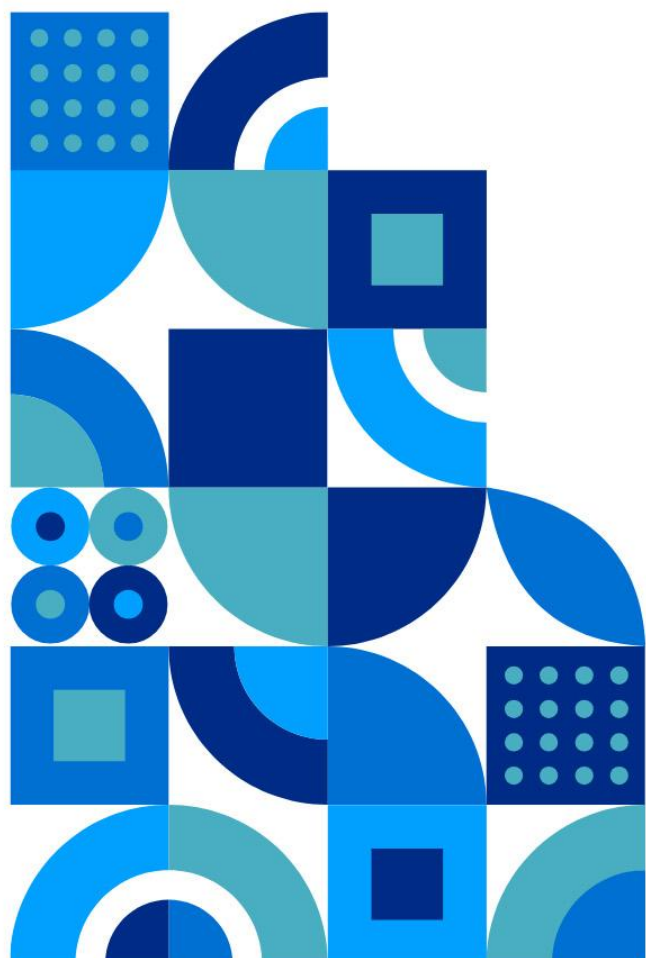
Rancangan Akhir

RENJA

**PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

2026

**DINAS
PERHUBUNGAN**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan di sektor Perhubungan yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha, sehingga rencana pembangunan di sektor Perhubungan perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal diharapkan dapat terwujud pemerataan pembangunan disektor perhubungan di seluruh Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara umum Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



M.FITRI HERNADI, AP, M.Si

NIP. 197511021994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	113
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	113
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kalimantan Selatan.....	116
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	117
3.3 Program dan Kegiatan.....	118
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	122
BAB V PENUTUP	149

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s.d Tahun 2025 Triwulan II.....	16
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan.s.d Tahun 2025 Triwulan II	35
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	39
Tabel 2.4 Capaian PAD Dinas Perhubungan Tahun 2025 (bulan Juni 2025)	41
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan.....	51
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional.....	113
Tabel 4.1 Target capaian Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Indikator Program Tahun 2026	123
Tabel 4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat.....	124

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Kerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan SKPD, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah 2025 – 2029 yaitu : **“KALSEL BEKERJA: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera “**

1.2 Landasan Hukum

A. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 berdasarkan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
19. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 Tanggal 30 Juni 2025 Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 23

B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Tugas Pokok

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Lalu Lintas Jalan;
- d. Memutuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mangordinasikan kegiatan Pelayaran;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Angkutan Jalan;
- f. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis;
- g. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Fungsi Instansi

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;

- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan Lalu Lintas Jalan;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan Pelayaran;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan Angkutan Jalan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan Pengelolaan kegiatan kesekretariatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada periode tahun 2026.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan Perhubungan yang telah ditetapkan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat Tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Telaahan Terhadap Kebijakan Kalimantan Selatan, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan, dan Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan beserta pendanaan.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu bab ini melaksanakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya kajian tersebut di kaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA perangkat daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Melaksanakan 4 (Empat) Program, 24 (Dua Puluh Empat) Kegiatan. Sedangkan UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan Melaksanakan 2 (Dua) Program. Anggaran APBD Murni Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan Tahun 2025 Sebesar Rp.150.407.196.433,00.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan sebagai berikut :

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.685.446.863,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.351.984.182 atau Sebesar 38,79% di Bulan Juli. Indikator kinerja program yaitu indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan dengan target sebesar 100 poin dan realisasi kinerja sebesar 85,12 poin atau capaian kinerja sebesar 85,12%.

Adapun kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 650.747.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 281.332.720,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 43,23%.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 14.892.201.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 6.428.058.233,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 43,16%.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 206.537.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 94.210.000,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 45,61%.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 209.869.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 85.980.146,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 40,97%.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 3.771.042.700,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.025.973.671,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 27,21%.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 1.138.385.500,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,00%.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 4.055.082.663,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.828.735.180,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 45,10%.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 1.761.582.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 607.694.232,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 34,50%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 11 (Sebelas) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.479.578.070,00 dan realisasi sebesar Rp. 61.464.045.585 atau Sebesar 52,77% di Bulan Juli. Indikator kinerja program yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Umum dengan Fatality Kecelakaan per 100.000 keberangkatan dengan capaian kinerja sebesar 85,12%.
- Adapun kegiatan pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut:
- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 52.497.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 14.296.626,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 27,23%.
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 37.810.366.950,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 34.623.932.744,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 91,57%.

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 1.260.018.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 450.038.960,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 35,72%.
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 85.911.600,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,00%.
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Pagu anggaran sebesar Rp. 3.501.674.300,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 3.395.074.043,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 96,96%.
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 73.110.162.820,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 22.901.953.212,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 31,33%.
- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pagu anggaran sebesar Rp. 19.602.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,00%.
- Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 261.523.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,00%.
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,

Pagu anggaran sebesar Rp. 129.119.600,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 21.600.000,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 16,73%.

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 121.677.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 56.850.000,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 46,72%.
- Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 127.025.800,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 300.000,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,24%.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0 atau Sebesar 0% di Bulan Juli. Indikator kinerja program yaitu Persentase Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 0%.

Adapun kegiatan pada Pengelolaan Perkeretaapian sebagai berikut:

- Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 45.600.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,00%.

4. Program Pengelolaan Pelayaran terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.035.799.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 527.528.147,00 atau Sebesar 17,37% di Bulan Juli. Indikator kinerja program yaitu Rasio Konektivitas Provinsi dengan capaian kinerja sebesar 85,12%.

Adapun kegiatan pada Pengelolaan Pelayaran sebagai berikut:

- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional, Pagu anggaran sebesar Rp. 77.804.300,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 39.957.447,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 51,36%.
- Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp. 195.940.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 2.110.000,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 1,08%.
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas, Pagu anggaran sebesar Rp. 59.478.800,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 19.578.960,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 32,92%.
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pagu anggaran sebesar Rp.

2.702.576.400,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 465.881.740,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 17,24%.

UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 (Enam) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.860.456.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 702.554.556,00 atau Sebesar 24,56% di Bulan Juli. Indikator kinerja program yaitu indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan dengan target sebesar 100 poin dan realisasi kinerja sebesar 85,12 poin atau capaian kinerja sebesar 85,12%.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 71.270.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 31.260.000,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 43,86%.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,00%.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 232.441.500,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 201.773.044,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 86,81%.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 130.500.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 0,00%.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 1.016.722.500,00 dengan

Realisasi sebesar Rp. 424.657.312,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 41,77%.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu anggaran sebesar Rp. 1.370.522.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 44.864.200,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 3,27%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.479.578.070,00 dan realisasi sebesar Rp. 61.464.045.585 atau Sebesar 52,77% di Bulan Juli. Indikator kinerja program yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Umum dengan Fatality Kecelakaan per 100.000 keberangkatan dengan capaian kinerja sebesar 85,12%.

Adapun kegiatan pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut:

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, Pagu anggaran sebesar Rp. 1.300.316.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 647.677.220,00 sehingga presentase capaian keuangan sebesar 49,81%.

Pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2025 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja Program dari 4 program sebesar 100 % (berhasil), penyerapan anggaran tahun 2025 untuk belanja sebesar 79,89 % (berhasil) sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2023. Namun demikian ada beberapa hal terkait tupoksi Dinas Perhubungan yang masih perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan kinerja antara lain peningkatan kinerja Sumber Daya

Manusia (SDM) , pelayanan publik, akurasi data base serta kelengkapan sarana dan prasarana sektor perhubungan. Analisis teknis untuk penyusunan rencana kerja tahun 2026 dapat dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun 2024 dan pencapaian RENSTRA Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2025 (perkiraan) yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Table 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s.d Tahun 2025 Triwulan II
Provinsi Kalimantan Selatan

- Dinas Perhubungan

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2025		Unit Penanggung Jawab					
				I		II															
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)										K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	95	%	26.685.446.863	88.28.00	%	4.747.331.494	88.89	%	10.351.984.182	88.89	%	10.351.984.182	93.57.00	38.79	88.89	%	10.351.984.182	93.57.00	38.79	
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	650.747.000	20	%	137.846.000	51	%	281.332.720	51	%	281.332.720	51	43.23.00	51	%	281.332.720	51	43.23.00	
X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	251.120.000	0	Dokumen	105.126.000	1	Dokumen	128.230.960	1	Dokumen	128.230.960	50	51.06.00	1	Dokumen	128.230.960	50	51.06.00	
X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.200.000	0	Dokumen	16.100.000	0	Dokumen	16.391.600	0	Dokumen	16.391.600	0	81.15.00	0	Dokumen	16.391.600	0	81.15.00	

X.XX.01.1.01 .03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen	20.200.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	16.391.600	0	Dokumen	16.391.600	0	81.15.00	0	Dokumen	16.391.600	0	81.15.00
X.XX.01.1.01 .04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dokumen	28.000.000	0	Dokumen	3.600.000	0	Dokumen	20.741.600	0	Dokumen	20.741.600	0	74.08.00	0	Dokumen	20.741.600	0	74.08.00
X.XX.01.1.01 .05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	22.774.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1.458.000	0	Dokumen	1.458.000	0	06.04	0	Dokumen	1.458.000	0	06.04
X.XX.01.1.01 .06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	45.500.000	1	Laporan	3.450.000	3	Laporan	5.844.000	3	Laporan	5.844.000	50	0,5583333 33	3	Laporan	5.844.000	50	0,5583333 33
X.XX.01.1.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	113.059.000	4	Laporan	9.570.000	8	Laporan	21.502.960	8	Laporan	21.502.960	47.06. 00	19.02	8	Laporan	21.502.960	47.06. 00	19.02

X.XX.01.1.01 .08 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	105.000.000	0	Data	0	0	Data	70.772.000	0	Data	70.772.000	0	67.04.00	0	Data	70.772.000	0	67.04.00
X.XX.01.1.01 .10 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	44.894.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	14.892.201.000	25	%	2.908.718.387	45	%	6.428.058.233	45	%	6.428.058.233	45	43.16.00	45	%	6.428.058.233	45	43.16.00
X.XX.01.1.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83/12	Orang/Bu an	14.632.538.000	83	Orang/Bu an	2.849.828.387	83	Orang/Bu an	6.307.224.233	83	Orang/Bu an	6.307.224.233	100	43.01.00	83	Orang/Bu an	6.307.224.233	100	43.01.00
X.XX.01.1.02 .02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	235.305.000	3	Dokumen	57.540.000	6	Dokumen	117.080.000	6	Dokumen	117.080.000	50	49.76	6	Dokumen	117.080.000	50	49.76
X.XX.01.1.02 .05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	24.358.000	0	Laporan	1.350.000	0	Laporan	3.754.000	0	Laporan	3.754.000	0	15.41	0	Laporan	3.754.000	0	15.41

X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	%	206.537.000	20	%	17.900.000	50	%	94.210.000	50	%	94.210.000	50	45.61	50	%	94.210.000	50	45.61
X.XX.01.1.03 .02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	105.000.000	1	Dokumen	16.850.000	2	Dokumen	41.958.000	2	Dokumen	41.958.000	50	39.96	2	Dokumen	41.958.000	50	39.96
X.XX.01.1.03 .06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	101.537.000	1	Dokumen	1.050.000	2	Dokumen	52.252.000	2	Dokumen	52.252.000	50	51.46.00	2	Dokumen	52.252.000	50	51.46.00
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	209.869.000	10	%	10.218.083	45	%	85.980.146	45	%	85.980.146	45	40.97	45	%	85.980.146	45	40.97
X.XX.01.1.05 .02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	83	Paket	68.400.000	0	Paket	0	2	Paket	65.490.000	2	Paket	65.490.000	02.41	95.75	2	Paket	65.490.000	02.41	95.75
X.XX.01.1.05 .09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	Orang	141.469.000	0	Orang	10.218.083	3	Orang	20.490.146	3	Orang	20.490.146	12.05	14.48	3	Orang	20.490.146	12.05	14.48
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan	100	%	3.771.042.700	20	%	583.884.822	35	%	1.025.973.671	35	%	1.025.973.671	35	27.21.00	35	%	1.025.973.671	35	27.21.00
X.XX.01.1.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	38.804.500	0	Paket	0	2	Paket	18.633.000	2	Paket	18.633.000	50	48.02.00	2	Paket	18.633.000	50	48.02.00

X.XX.01.1.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	99.696.000	0	Paket	14.541.900	2	Paket	14.541.900	2	Paket	14.541.900	50	14.59	2	Paket	14.541.900	50	14.59
X.XX.01.1.06 .04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.761.546.200	0	Paket	470.774.400	1	Paket	821.354.500	1	Paket	821.354.500	25	29.74	1	Paket	821.354.500	25	29.74
X.XX.01.1.06 .05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	109.675.000	0	Paket	26.567.000	2	Paket	26.567.000	2	Paket	26.567.000	50	24.22.00	2	Paket	26.567.000	50	24.22.00
X.XX.01.1.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	25.800.000	3	Dokumen	2.600.000	6	Dokumen	6.500.000	6	Dokumen	6.500.000	50	25.19.00	6	Dokumen	6.500.000	50	25.19.00
X.XX.01.1.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	685.377.000	3	Laporan	56.578.522	6	Laporan	114.347.312	6	Laporan	114.347.312	50	0,71388889	6	Laporan	114.347.312	50	0,71388889
X.XX.01.1.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	50.144.000	3	Dokumen	12.823.000	6	Dokumen	24.029.959	6	Dokumen	24.029.959	50	47.92	6	Dokumen	24.029.959	50	47.92
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.138.385.500	5	%	0	10	%	0	10	%	0	10	0	10	%	0	10	0
X.XX.01.1.07 .05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	132.785.500	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0	Paket	0	0	0

X.XX.01.1.07 .06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	Unit	1.005.600.00 0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	%	4.055.082.66 3	25	%	936.096.302	50	%	1.828.735.1 80	50	%	1.828.735.1 80	50	45.01.00	50	%	1.828.735.1 80	50	45.01.00
X.XX.01.1.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	977.172.963	3	Laporan	283.191.302	6	Laporan	590.122.820	6	Laporan	590.122.820	50	60.39.00	6	Laporan	590.122.820	50	60.39.00
X.XX.01.1.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.077.909.70 0	3	Laporan	652.905.000	6	Laporan	1.238.612.3 60	6	Laporan	1.238.612.3 60	50	40.24.00	6	Laporan	1.238.612.3 60	50	40.24.00
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100	%	1.761.582.00 0	10	%	152.667.900	50	%	607.694.232	50	%	607.694.232	50	34.05.00	50	%	607.694.232	50	34.05.00
X.XX.01.1.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	1.425.086.00 0	0	Unit	115.197.900	5	Unit	527.816.392	5	Unit	527.816.392	55.56. 00	37.04.00	5	Unit	527.816.392	55.56. 00	37.04.00

X.XX.01.1.09 .10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	336.496.000	0	Unit	37.470.000	0	Unit	79.877.840	0	Unit	79.877.840	0	1,0097222 22	0	Unit	79.877.840	0	1,0097222 22
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas	0,0451388 89	%	116.479.578. 070	0,4506944 44	%	32.311.543. 664	0,4506944 44	%	61.464.045. 585	0,4506944 44	%	61.464.045. 585	99.85	52.77	0,4506944 44	%	61.464.045. 585	99.85	52.77
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100.000 Keberangkatan (-)	0,0520833 33	%	0	0	%		0	%		0	%		0	0	0	%		0	0
2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase rencana induk jaringan LLAJ yang diterbitkan	100	%	52.497.000	0	%	0	30	%	14.296.626	30	%	14.296.626	30	27.23.00	30	%	14.296.626	30	27.23.00
2.15.02.1.01 .04 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1	Dokumen	52.497.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	14.296.626	0	Dokumen	14.296.626	0	27.23.00	0	Dokumen	14.296.626	0	27.23.00
2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Presentase Fasilitas keselamatan jalan yang memenuhi standar di ruas jalan provinsi	100	%	37.810.366.9 50	40	%	17.504.850. 100	80	%	34.623.932. 744	80	%	34.623.932. 744	80	91.57.00	80	%	34.623.932. 744	80	91.57.00
2.15.02.1.02 .02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	450	Unit	27.623.766.2 50	350	Unit	12.085.583. 100	445	Unit	25.271.150. 994	445	Unit	25.271.150. 994	98.89	91.48.00	445	Unit	25.271.150. 994	98.89	91.48.00

2.15.02.1.02 .04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	350	Unit	10.186.600.700	200	Unit	5.419.267.000	350	Unit	9.352.781.750	350	Unit	9.352.781.750	100	91.81	350	Unit	9.352.781.750	100	91.81
2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	100	%	1.260.018.000	20	%	166.930.000	55	%	450.038.960	55	%	450.038.960	55	35.72	55	%	450.038.960	55	35.72
2.15.02.1.05 .01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12	Laporan	99.478.100	1	Laporan	0	7	Laporan	18.420.000	7	Laporan	18.420.000	58.33.00	18.52	7	Laporan	18.420.000	58.33.00	18.52
2.15.02.1.05 .03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	Dokumen	195.745.000	0	Dokumen	0	3	Dokumen	3.922.000	3	Dokumen	3.922.000	75	2	3	Dokumen	3.922.000	75	2
2.15.02.1.05 .04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	13	Laporan	765.310.000	3	Laporan	166.930.000	6	Laporan	376.796.960	6	Laporan	376.796.960	46.15.00	49.23.00	6	Laporan	376.796.960	46.15.00	49.23.00
2.15.02.1.05 .05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	Laporan	199.484.900	2	Laporan	0	4	Laporan	50.900.000	4	Laporan	50.900.000	100	25.52.00	4	Laporan	50.900.000	100	25.52.00

2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Presentase dokumen andalalin yang diterbitkan	100	%	85.911.600	5	%	0	15	%	0	15	%	0	15	0	15	%	0	15	0
2.15.02.1.06 .03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4	Laporan	70.103.200	1	Laporan	0	4	Laporan	0	4	Laporan	0	100	0	4	Laporan	0	100	0
2.15.02.1.06 .04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4	Laporan	15.808.400	0	Laporan	0	1	Laporan	0	1	Laporan	0	25	0	1	Laporan	0	25	0
2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	100	%	3.501.674.300	50	%	3.393.546.043	75	%	3.395.074.043	75	%	3.395.074.043	75	96.96	75	%	3.395.074.043	75	96.96
2.15.02.1.07 .04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	12	Laporan	41.524.000	3	Laporan	0	7	Laporan	251.500	7	Laporan	251.500	58.330,00	0,04236111	7	Laporan	251.500	58.330,00	0,04236111
2.15.02.1.07 .05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	Laporan	20.018.800	0	Laporan	0	2	Laporan	0	2	Laporan	0	50	0	2	Laporan	0	50	0

2.15.02.1.07 .08 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	4	Dokumen	5.393.000	3	Dokumen	0	4	Dokumen	852.000	4	Dokumen	852.000	100	15.08	4	Dokumen	852.000	100	15.08
2.15.02.1.07 .11 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4	Lokasi	3.429.740.000	2	Lokasi	3.393.546.043	4	Lokasi	3.393.970.543	4	Lokasi	3.393.970.543	100	98.96	4	Lokasi	3.393.970.543	100	98.96
2.15.02.1.07 .13 Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	Dokumen	4.998.500	0	Dokumen	0	2	Dokumen	0	2	Dokumen	0	50	0	2	Dokumen	0	50	0
2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia	78.79	%	73.110.162.820	20	%	11.208.417.521	40	%	22.901.953.212	40	%	22.901.953.212	50.77	31.33.00	40	%	22.901.953.212	50.77	31.33.00
2.15.02.1.08 .02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4	Laporan	18.476.900	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	Laporan	0	0	0

2.15.02.1.08 .03 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	91	Unit	73.091.685.9 20	91	Unit	11.208.417. 521	91	Unit	22.901.953. 212	91	Unit	22.901.953. 212	100	31.33.00	91	Unit	22.901.953. 212	100	31.33.00
2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pentapan jaringan trayek di provinsi kalimantan selatan	100	%	19.602.000	0	%	0	50	%	0	50	%	0	50	0	50	%	0	50	0
2.15.02.1.10 .02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	4	Dokumen	19.602.000	0	Dokumen	0	2	Dokumen	0	2	Dokumen	0	50	0	2	Dokumen	0	50	0
2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan	100	%	261.523.000	0	%	0	20	%	0	20	%	0	20	0	20	%	0	20	0

2.15.02.1.12 .01 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	210.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
2.15.02.1.12 .02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	4	Dokumen	51.523.000	0	Dokumen	0	2	Dokumen	0	2	Dokumen	0	50	0	2	Dokumen	0	50	0
2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentse rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di terbitkan	100	%	129.119.600	10	%	9.300.000	45	%	21.600.000	45	%	21.600.000	45	0,71736111	45	%	21.600.000	45	0,71736111

2.15.02.1.13 .01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	4	Unit	24.485.000	0	Unit	0	0	Unit	3.000.000	0	Unit	3.000.000	0	12.25	0	Unit	3.000.000	0	12.25
2.15.02.1.13 .02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4	Laporan	104.634.600	1	Laporan	9.300.000	2	Laporan	18.600.000	2	Laporan	18.600.000	50	0,7625	2	Laporan	18.600.000	50	0,7625
2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi dalam provinsi	100	%	121.677.000	10	%	28.500.000	50	%	56.850.000	50	%	56.850.000	50	46.72	50	%	56.850.000	50	46.72

2.15.02.1.14 .03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4	Laporan	121.677.000	0	Laporan	28.500.000	2	Laporan	56.850.000	2	Laporan	56.850.000	50	46.72	2	Laporan	56.850.000	50	46.72
2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan	100	%	127.025.800	0	%	0	40	%	300.000	40	%	300.000	40	00.24	40	%	300.000	40	00.24
2.15.02.1.15 .01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	Dokumen	69.548.200	0	Dokumen	0	2	Dokumen	0	2	Dokumen	0	50	0	2	Dokumen	0	50	0

2.15.02.1.15 .02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	Dokumen	23.280.000	1	Dokumen	0	2	Dokumen	300.000	2	Dokumen	300.000	50	01.29	2	Dokumen	300.000	50	01.29
2.15.02.1.15 .03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Laporan	34.197.600	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	Laporan	0	0	0
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas	0,04513889	%	3.035.799.500	0,18888889	%	254.625.4970	0,18888889	%	527.528.1470	0,18888889	%	527.528.147	41.85	17.38	0,18888889	%	527.528.147	41.85	17.38
2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Rekomendasi perbitan izin usaha angkutan laut dalam daerah provinsi kalimantan selatan	100	%	77.804.300	20	%	20.181.497	50	%	39.957.447	50	%	39.957.447	50	51.36.00	50	%	39.957.447	50	51.36.00

2.15.03.1.02 .01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	10	Unit	77.804.300	2	Unit	20.181.497	6	Unit	39.957.447	6	Unit	39.957.447	60	51.36.00	6	Unit	39.957.447	60	51.36.00
2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan	100	%	195.940.000	19	%	910.000	40	%	2.110.000	40	%	2.110.000	40	01.08	40	%	2.110.000	40	01.08

2.15.03.1.05 .03 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	10	Dokumen	195.940.000	1	Dokumen	910.000	4	Dokumen	2.110.000	4	Dokumen	2.110.000	40	01.08	4	Dokumen	2.110.000	40	01.08
2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Presentase rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang di terbitkan	100	%	59.478.800	26.67	%	9.942.000	75	%	19.578.960	75	%	19.578.960	75	32.92	75	%	19.578.960	75	32.92

2.15.03.1.06 .01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15	Dokumen	59.478.800	4	Dokumen	9.942.000	13	Dokumen	19.578.960	13	Dokumen	19.578.960	86.67	32.92	13	Dokumen	19.578.960	86.67	32.92
														86.67	32.92					
														T	SR					
2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	25.64	%	2.702.576.400	0	%	223.592.000	17.32	%	465.881.740	17.32	%	465.881.740	67.55.00	17.24	17.32	%	465.881.740	67.55.00	17.24

2.15.03.1.10 .03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	9	Unit	2.467.712.400	1	Unit	166.172.000	1	Unit	350.639.980	1	Unit	350.639.980	11.11	14.21	1	Unit	350.639.980	11.11	14.21
2.15.03.1.10 .08 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	Laporan	234.864.000	1	Laporan	57.420.000	2	Laporan	115.241.760	2	Laporan	115.241.760	50	49.07.00	2	Laporan	115.241.760	50	49.07.00
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	100	%	45.600.000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	100	%	45.600.000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0	0
2.15.05.1.01 .02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2	Dokumen	45.600.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																0	0			

- UPTD

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaans.d Tahun 2025 Triwulan II

3	4	5		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						8		9		10		11		12								
				I		II		K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)																			
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Poin	2.860.456.000	25	Poin	288.136.434	50	Poin	702.554.556	50	Poin	702.554.556	50	24.56.00	50	Poin	702.554.556	50	24.56.00						
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	71.270.000	3	Dokumen	15.630.000	6	Dokumen	31.260.000	6	Dokumen	31.260.000	50	43.86	6	Dokumen	31.260.000	50	43.86						

X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	68.720.000	3	Dokumen	15.630.000	6	Dokumen	31.260.000	6	Dokumen	31.260.000	50	45.49.00	6	Dokumen	31.260.000	50	45.49.00
X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	550.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	Laporan	0	0	0
X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.000.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	Laporan	0	0	0
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Poin	39.000.000	25	Poin	0	50	Poin	0	50	Poin	0	50	0	50	Poin	0	50	0
X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	39.000.000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	0	Paket	0	0	0
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Poin	232.441.500	25	Poin	55.934.000	50	Poin	201.773.044	50	Poin	201.773.044	50	86.81	50	Poin	201.773.044	50	86.81
X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	49.182.900	0	Paket	0	1	Paket	47.036.250	1	Paket	47.036.250	100	95.64	1	Paket	47.036.250	100	95.64
X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	49.870.600	0	Paket	0	2	Paket	44.398.150	2	Paket	44.398.150	100	89.03.00	2	Paket	44.398.150	100	89.03.00
X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	35.625.000	0	Paket	0	2	Paket	34.285.000	2	Paket	34.285.000	100	96.24.00	2	Paket	34.285.000	100	96.24.00
X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	1	Dokumen	4.800.000	0	Dokumen	360.000	1	Dokumen	1.035.000	1	Dokumen	1.035.000	100	21.56	1	Dokumen	1.035.000	100	21.56
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114	Laporan	92.963.000	18	Laporan	55.574.000	50	Laporan	75.018.644	50	Laporan	75.018.644	43.86	80.07.00	50	Laporan	75.018.644	43.86	80.07.00
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Poin	130.500.000	25	Poin	0	50	Poin	0	50	Poin	0	50	0	50	Poin	0	50	0

Pemerintah Daerah																				
X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	72.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0
X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	58.500.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Unit	1.016.722.500	25	Unit	205.732.434	50	Unit	424.657.312	50	Unit	424.657.312	50	41.77	50	Unit	424.657.312	50	41.77
X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	168.000.000	3	Laporan	23.556.794	6	Laporan	51.552.712	6	Laporan	51.552.712	50	30.69	6	Laporan	51.552.712	50	30.69
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	848.722.500	3	Laporan	182.175.640	6	Laporan	373.104.600	6	Laporan	373.104.600	50	43.96	6	Laporan	373.104.600	50	43.96
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Poin	1.370.522.000	25	Poin	10.840.000	50	Poin	44.864.200	50	Poin	44.864.200	50	03.27	50	Poin	44.864.200	50	03.27
X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	106.160.000	4	Unit	10.840.000	4	Unit	41.204.200	4	Unit	41.204.200	50	38.81	4	Unit	41.204.200	50	38.81
X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	16.100.000	0	Unit	0	6	Unit	3.660.000	6	Unit	3.660.000	24	0,967361111	6	Unit	3.660.000	24	0,967361111
X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diperbaiki	6	Unit	1.248.262.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	75	%	1.300.316.000	15	%	298.637.880	30	%	647.677.220	30	%	647.677.220	40	49.81	30	%	647.677.220	40	49.81

	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi	100	%	0	25	%		50	%		50	%		50	0	50	%		50	0
	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	02.25	%	0	2	%		0,09375	%		2	%		88.89	0	2	%		88.89	0
	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	50	%	0	10	%		15	%		15	%		30	0	15	%		30	0
2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang Diawasi	5	Unit	1.300.316.000	1	Unit	298.637.880	5	Unit	647.677.220	5	Unit	647.677.220	100	49.81	5	Unit	647.677.220	100	49.81
2.15.02.1.03.06 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang Diawasi	5	Unit	1.300.316.000	1	Unit	298.637.880	5	Unit	647.677.220	5	Unit	647.677.220	100	49.81	5	Unit	647.677.220	100	49.81

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
1	Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe B					50 %						
2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1					61						

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	daerah provinsi kelas ekonomi											
3	presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi					28 %						
2.	Indikator Kinerja PD											
1	Rasio Konektivitas Provinsi			0.57	0.59	0.61	0.63	0.5987	0.603	0.61	0.63	
2	On time Performance Layanan Transportasi			34	58.5	58.5	59	0.166	75.5	58.5	59	
3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 Keberangkatan			2.73	2.65	2.6	1.6	0	3.075	2.6	1.6	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi			77.5	81.3	81.5	81.7	77.5	78.9	81.5	81.7	
5	V/C Ratio Jalan Provinsi			0.5	0.5	0.5		0.265	0.44			

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan jika dilihat Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dinas penghasil maka dapat digambarkan capaian kinerja pemenuhan Pendapatan Asli Daerah bidang perhubungan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian PAD Dinas Perhubungan Tahun 2025 (bulan Juni 2025)

No	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.430.000.000	3.184.486.641	76,30
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.280.000.000,-	3.112.173.641,-	136,49
4.1.0202.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.280.000.000,-	3.112.173.641,-	136,49
	Retribusi Terminal	150.000.000,-	72.313.000,-	48.20
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,-	72.313.000,-	48.20

Hasil pencapaian pendapatan Dinas Perhubungan pada tahun 2025 sampai dengan bulan juni menunjukkan angka yang positif, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.280.000.000,- yang telah direalisasikan bisa mencapai Rp. 3.112.173.641,- atau 136,49% target telah tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian pendapatan yang baik pada Dinas Perhubungan .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terdapat lima masalah besar yang tengah melilit sektor transportasi darat di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Pengelolaan transportasi darat belum efisien dan efektif terutama di daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T);
2. Kurangnya rasa kebersamaan dalam penggunaan transportasi darat seperti egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya;
3. Masih mengabaikan aspek keselamatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas);
4. Angkutan massal yang belum merata terutama di wilayah kepulauan;
5. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, yang di akibatkan oleh belum terintegrasinya antar sektor transportasi umum.

Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal, konvensi bahan bakar fosil ke gas bahkan sudah mengarah ke sistem transportasi yang digerakkan dengan listrik dan memaksimalkan *inteligensia transport management* (manajemen transportasi yang cerdas) sehingga menyediakan layanan inovatif terkait moda transportasi dan manajemen lalu lintas yang berbeda.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat ini masih aktual adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan

harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut;

2. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke seamless transport.(transportasi yang lancar);
3. Perlunya penataan transportasi perkotaan yang memiliki kondisi lingkungan udara yang sehat, peningkatan daya saing serta mendorong investasi;
4. Rendahnya penggunaan angkutan umum yang di indikasikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi;
5. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan transportasi masal berbasis jalan dan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.
6. Perlunya peningkatan peran Terminal tipe B untuk peningkatan pelayanan umum yang efektif dan efisien sebagai pintu gerbang IKN.
7. Kurangnya disiplin masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas khususnya bagi angkutan umum dan angkutan barang.
8. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap over dimensi dan over loading, yang mengakibatkan kurangnya keselamatan berlalu lintas.
9. Masih kurangnya manajemen rekayasa lalu lintas untuk ruas jalan provinsi yang berkeselamatan.
10. Kurangnya sosialisasi terhadap ketersediaan angkutan umum.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, secara umum bidang transportasi yang

terdiri dari transportasi darat, udara dan sungai dihadapkan pada permasalahan berupa rendahnya kualitas dan cakupan layanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa:

1. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
2. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
3. Kurangnya penyediaan angkutan umum masal yang efektif, efisien dan tepat waktu;
4. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
5. Belum optimalnya pelayanan terminal tipe B.

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas moda transportasi, (3) Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah, (4) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang, (5) Belum adanya skylift truck untuk perbaikan lampu lalu lintas, (6) kurangnya kualitas dan pelayanan yang didapat dari Terminal tipe B, (7)) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

Jika dilihat dari dampak tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mendukung visi dan Misi Ke Dua “Pembangunan Infrastruktur Yang Handal” sedangkan dampak terhadap capain program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik bidang perhubungan dengan

merencanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja VISI/MISI Gubernur maupun capaian program nasional.

Tantangan dan peluang dalam mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mengoptimalkan pelayanan publik bidang perhubungan berbasis teknologi adalah adanya keterbatasan anggaran dan profesionalisme aparatur, sedangkan peluangnya masih adanya pemerataan dalam pendelegasian SDM dan budaya komunikasi yang luwes sehingga perencanaan per bidang saling terkait untuk mendukung satu tujuan.
2. Tantangan dalam mendukung pemerataan pembangunan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu penurunan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi, serta pertambahan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan penggunaan transportasi sedangkan peluangnya masih tersedianya pelayanan ijin trayek dan survey load factor yang bisa menjadi dasar penentuan permintaan masyarakat terhadap angkutan.
3. Tantangan untuk mendukung mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu belum memiliki jaringan trayek yang terpadu antar moda, intra moda ataupun multi moda dan semakin berkembangnya kemajuan daerah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, masih banyaknya angkutan barang yang beroperasi di jalan tanpa mengindahkan kelebihan muatan dan kelebihan dimensi kendaraan angkutnya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan penyelenggaraan pembangunan dan

pengembangan urusan pelayanan di sektor perhubungan. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan isu-isu di tingkat nasional maupun propinsi maka ada beberapa isu penting (isu strategis) bidang perhubungan yaitu :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perhubungan secara komprehensif
2. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional teknis bidang perhubungan, alat komunikasi, dll
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun.
4. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender masih dipandang kecil manfaatnya sehingga belum banyak program/kegiatan yang mengakomodir kepentingan tersebut
5. Mendukung kegiatan yang bersifat ramah disabilitas khususnya dalam hal memberikan pelayanan angkutan umum / angkutan massal.
6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas;
7. Peningkatan peran dan fungsi Terminal Tipe B dalam hal melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan yang efektif dan efisien.
8. Masih rendahnya peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat

lain karena rendahnya standar pelayanan angkutan umum dan semakin maraknya angkutan online;

9. Peningkatan tindakan terhadap pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya.
10. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal yang terpadu dan berkelanjutan, baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
11. Tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang belum optimal;
12. Tingkat keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum optimal;
13. Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas terkait dengan pengaturan, pengawasan dan pengendalian permasalahan di ruas jalan provinsi.
14. Perlunya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi

Dari isu strategis tersebut di atas maka diperlukan strategi pembangunan sektor perhubungan dimana strategi tersebut merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan strategik seperti kemampuan anggaran, potensi pengembangan sektor perhubungan, sumber daya aparatur dan dukungan stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan di ambil untuk pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang dilakukan Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan

Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

13. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
14. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
15. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perhubungan Provinsi berdasarkan RKPD.

RKPD tahun 2026 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERHUBUNGAN			94.418.487.052					94.418.487.052	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			94.418.487.052		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			94.418.487.052	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			94.418.487.052		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			94.418.487.052	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Kegiatan Tepat Waktu</i>	100 %	28.139.723.958		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Kegiatan Tepat Waktu</i>	100 %	28.139.723.958	
	[Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Trasanportasi]	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	80	28.139.723.958	-	[Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Trasanportasi]	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	80	28.139.723.958	-
		Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100%				Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100%		
		Nilai pendapatan UPT	120.000.000				Nilai pendapatan UPT	120.000.000		
		Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindak Lanjut	100%				Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindak Lanjut	100%		

		Persentase kegiatan tepat waktu	100%				Persentase kegiatan tepat waktu	100%		
		Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%				Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu	100%		
		Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100				Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 %	785.819.600			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 %	785.819.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	222.219.600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	222.219.600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	25.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	60.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	60.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	203.600.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	203.600.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
		<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	12 Data	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.		<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	12 Data	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.

					Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	12 Dokumen	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	12 Dokumen	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	15.290.000.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	15.290.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan	15.000.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan	15.000.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	240.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	240.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100 %	200.000.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100 %	200.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
		<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Pesentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	100 %	275.788.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Pesentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	100 %	275.788.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										

		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	75.875.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	75.875.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	26 Orang	199.913.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	26 Orang	199.913.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan</i>	100 %	5.806.028.300		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan</i>	100 %	5.806.028.300	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	42.974.200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	42.974.200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	98.141.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	98.141.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	3.299.991.300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	3.299.991.300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	108.999.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	108.999.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	28.200.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	28.200.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	2.168.978.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	2.168.978.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

				Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong,				Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong,
--	--	--	--	---	--	--	--	---

					Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	58.744.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	58.744.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	790.185.500		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	790.185.500	
Pengadaan Mebel										
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Paket	146.785.500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Paket	146.785.500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	9 Unit	643.400.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	9 Unit	643.400.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	100 %	3.024.944.558		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	100 %	3.024.944.558	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.074.999.858	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.074.999.858	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.949.944.700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.949.944.700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	100 %	1.966.958.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	100 %	1.966.958.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	41 Unit	1.581.566.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	41 Unit	1.581.566.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	385.392.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	385.392.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi Rasio Konektivitas Darat Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsei Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang</i>	0 % 0.63 % 2 % 60 % 77.5 %	62.265.865.394		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi Rasio Konektivitas Darat Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsei Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang</i>	0 % 0.63 % 2 % 60 % 77.5 %	62.265.865.394	
	[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat]	Rasio Konektivitas Darat Rasio konektivitas provinsi	0.63:0.63 0.65:0.65	62.265.865.394	-	[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat]	Rasio Konektivitas Darat Rasio konektivitas provinsi	0.63:0.63 0.65:0.65	62.265.865.394	-
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang diterbitkan	100 %	150.000.000		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang diterbitkan	100 %	150.000.000	
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi										
		Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi										

		<i>Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Persentase Fasilitas Keselamatan jalan yang memenuhi standar di ruas jalan provinsi</i>	100 %	26.510.800.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Persentase Fasilitas Keselamatan jalan yang memenuhi standar di ruas jalan provinsi</i>	100 %	26.510.800.000	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi										
		<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun</i>	4 Unit	250.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun</i>	4 Unit	250.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										

		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>	300 Unit	21.003.600.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>	300 Unit	21.003.600.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										

		<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>	11 Unit	250.000.000	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>	11 Unit	250.000.000	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>	200 Unit	5.007.200.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>	200 Unit	5.007.200.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	100 %	50.000.000		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	100 %	50.000.000	
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B										

		<i>Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	5 Unit	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	5 Unit	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Persentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	100 %	2.963.305.500		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Persentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	100 %	2.963.305.500	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi										
		<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	16 Laporan	1.594.470.600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	16 Laporan	1.594.470.600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi										
		<i>Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	4 Dokumen	144.324.600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	4 Dokumen	144.324.600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi										

		<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>	12 Laporan	853.998.500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>	12 Laporan	853.998.500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi										
		<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	10 Laporan	149.911.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	10 Laporan	149.911.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										
		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan</i>	4 Unit	220.600.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan</i>	4 Unit	220.600.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Persentase Dokumen Andalalin yang diterbitkan</i>	100 %	149.801.700		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Persentase Dokumen Andalalin yang diterbitkan</i>	100 %	149.801.700	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin										

		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	12 Laporan	99.834.500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	12 Laporan	99.834.500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin										
		<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	6 Laporan	49.967.200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	6 Laporan	49.967.200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Persentase Dokumen Andalalin yang diterbitkan</i>	100 %	2.713.364.000		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Persentase Dokumen Andalalin yang diterbitkan</i>	100 %	2.713.364.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi										
		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</i>	12 Laporan	75.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</i>	12 Laporan	75.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										

		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	4 Laporan	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	4 Laporan	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)										
		<i>Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi</i>	4 Dokumen	45.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi</i>	4 Dokumen	45.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										
		<i>Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	3 Orang	13.364.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	3 Orang	13.364.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)										

		<i>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</i>	4 Lokasi	2.500.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</i>	4 Lokasi	2.500.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										
		<i>Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	4 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	4 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Provinsi Provinsi yang tersedia</i>	100 %	28.599.448.594		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Provinsi Provinsi yang tersedia</i>	100 %	28.599.448.594	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi										
		<i>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	6 Laporan	299.854.400	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	6 Laporan	299.854.400	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	100 Unit	28.299.594.194	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	100 Unit	28.299.594.194	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	100 %	80.000.000		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	100 %	80.000.000	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	3 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	3 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	4 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	4 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi</i>	100 %	110.000.000		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi</i>	100 %	110.000.000	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi										

		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	2 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	2 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota</i>	100 %	450.000.000		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota</i>	100 %	450.000.000	
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	400.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	400.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi										

		<i>Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	2 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>	2 Dokumen	50.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan</i>	100 %	133.598.800		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan</i>	100 %	133.598.800	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
		<i>Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan</i>	5 Unit	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan</i>	5 Unit	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>	4 Laporan	103.598.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>	4 Laporan	103.598.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

					Kel/Desa					Kel/Desa
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi dalam provinsi</i>	100 %	265.546.800		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi dalam provinsi</i>	100 %	265.546.800	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi</i>	4 Laporan	265.546.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi</i>	4 Laporan	265.546.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan</i>	100 %	90.000.000		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan</i>	100 %	90.000.000	
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		<i>Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		<i>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3,	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konetivitas Air	0.62 %	3.982.897.700		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konetivitas Air	0.62 %	3.982.897.700	
	[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Laut]	Konektivitas Laut Rasio Konektivitas Air	0.55 0.62:0.62	3.982.897.700	-	[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Laut]	Konektivitas Laut Rasio Konektivitas Air	0.55 0.62:0.62	3.982.897.700	-

	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	<i>Persentase Rekomendasi perbitan izin usaha angkutan laut dalam daerah provinsi kalimantan selatan</i>	100 %	129.615.900		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	<i>Persentase Rekomendasi perbitan izin usaha angkutan laut dalam daerah provinsi kalimantan selatan</i>	100 %	129.615.900	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
		<i>Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan</i>	10 Unit	129.615.900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan</i>	10 Unit	129.615.900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas Pelabuhan antar daerah dalam 1 daerah Provinsi yang di tetapkan</i>	100 %	164.998.900		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas Pelabuhan antar daerah dalam 1 daerah Provinsi yang di tetapkan</i>	100 %	164.998.900	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi										

		<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</i>	30 Dokumen	164.998.900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</i>	30 Dokumen	164.998.900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	<i>Presentase rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang di terbitkan</i>	100 %	100.051.100		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	<i>Presentase rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang di terbitkan</i>	100 %	100.051.100	
<p>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>										

		<i>Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	30 Dokumen	100.051.100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	30 Dokumen	100.051.100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar</i>	100 %	3.588.231.800		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar</i>	100 %	3.588.231.800	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan</i>	6 Unit	3.229.405.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan</i>	6 Unit	3.229.405.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

		<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	358.826.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	358.826.800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4,	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	<i>Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian</i>	100 %	30.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	<i>Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian</i>	100 %	30.000.000	
	[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat]	<i>Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian</i>	0 100	30.000.000	-	[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat]	<i>Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian</i>	0 100	30.000.000	-
	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Jaringan Perkeretaapian provinsi yang di tetapkan</i>	100 %	30.000.000		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Jaringan Perkeretaapian provinsi yang di tetapkan</i>	100 %	30.000.000	
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi										
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan</i>	1 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan</i>	1 Dokumen	30.000.000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
				94.418.487.052						

UPTD

RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UPTD TERMINAL TIPE B DAN TRANS PERKOTAAN			13.019.466.800,00						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.019.466.800,00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.019.466.800,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			13.019.466.800,00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			13.019.466.800,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kepuasan Layanan UPT Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan</i>	90 %	3.691.371.800,00		1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kepuasan Layanan UPT Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan</i>	90 %	3.691.371.800,00
	[Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan]	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	75	3.691.371.800,00	-		[Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan]	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	75	3.691.371.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	114.210.000,00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	114.210.000,00

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	105.560.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	105.560.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5 Laporan	8.650.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5 Laporan	8.650.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan</i>	100 %	36.000.000,00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan</i>	100 %	36.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	36.000.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	36.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	460.902.400,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	460.902.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	34.141.500,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	34.141.500,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	38.172.900,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	38.172.900,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	18.232.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	18.232.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	4.800.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	4.800.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	149 Laporan	365.556.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen Kab. Tabalong, Murung Pudak, Mabu'un Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	149 Laporan	365.556.000,00

					Luar Kab. Tanah Bumbu, Batu Licin, Kersik Putih					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana</i>	100 %	122.000.000,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana</i>	100 %	122.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	62.000.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	62.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	60.000.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	60.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana</i>	100 %	2.732.549.400,00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana</i>	100 %	2.732.549.400,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	162.000.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	162.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	2.570.549.400,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen Kab. Tabalong, Murung Pudak, Mabu'un Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar Kab. Tanah Bumbu, Batu Licin, Kersik Putih			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	2.570.549.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana</i>	100 %	225.710.000,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana</i>	100 %	225.710.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	91.560.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	91.560.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	22 Unit	21.650.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	22 Unit	21.650.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	112.500.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	112.500.000,00
2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Indeks Kepuasan Layanan UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan</i>	75 %	9.328.095.000,00		2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Indeks Kepuasan Layanan UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan</i>	75 %	9.328.095.000,00
	[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat]	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	75	9.328.095.000,00	-		[Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat]	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	75	9.328.095.000,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	100 %	1.509.917.000,00			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	100 %	1.509.917.000,00
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B										

		<i>Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	5 Unit	1.416.060.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen Kab. Tabalong, Murung Pudak, Mabu'un Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar Kab. Tanah Bumbu, Batu Licin, Kersik Putih			<i>Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>	5 Unit	1.416.060.000,00
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B										
		<i>Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.</i>	8 Orang	91.857.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.</i>	8 Orang	91.857.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
		<i>Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara</i>	1 Unit	2.000.000,00	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar			<i>Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara</i>	1 Unit	2.000.000,00
	-	-	-	9.328.095.000,00	-		-	-	-	9.328.095.000,00

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	100 Unit	7.818.178.000,00			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	100 Unit	7.818.178.000,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	1 Unit	7.818.178.000,00	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	1 Unit	7.818.178.000,00
				13.019.466.800,00						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota/Provinsi.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini :

Tabel T-C.32.

Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan

- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	orang/bulan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	83	orang
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1	dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Disediakan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan
	Dukungan pelaksanaan sitem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	unit

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang diterbitkan		
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	Dokumen
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1	Dokumen
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1268	unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	490	unit
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	Laporan
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	Dokumen
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	10	Laporan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	13	Laporan
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4	Laporan
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	laporan
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10	laporan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4	Laporan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	13	Laporan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4	Laporan
	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	4	Dokumen
	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Orang

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Dinas Perhubungan	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi		Lokasi
	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	4	Dokumen
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Prosentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia		
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4	Laporan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	91	Unit
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut Penumpang/Barang Persentase Penetapan		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			angkutan perkotaan di kalimantan selatan		
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	dokumen
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	dokumen
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut Penumpang/Barang persentase pentapan jaringan trayek di provinsi kalimantan selatan		
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	13	dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Presentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan		
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2	Dokumen
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	2	Dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut Penumpang/Barang Presentse rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di terbitkan		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	50	unit
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4	laporan
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut Penumpang/Barang Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			dalam provinsi		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4	laporan
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi		
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	dokumen
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	dokumen
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase data Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kota/Kab dalam Provinsi yang beroperasi		
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5	dokumen
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dinas Perhubungan	Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	15	dokumen

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Dinas Perhubungan	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan		Unit
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar		
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	9	unit

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	laporan

- UPTD TERMINAL TIPE B

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Tenaga Keuangan yang diberikan honor selama satu tahun	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	2 Paket
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Komponen instalasi listrik bangunan kantor	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah ATK selama satu Tahun	2 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Cetak dan Penggandaan selama satu tahun	2 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Bahan Bacaan selama satu tahun	1 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi Selama satu tahun	60 Laporan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	5 Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Bangunan Kantor yang Terbayarkan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	8 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	38 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang	3 Unit

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Pendukung)		Terehabilitasi dan Terpelihara	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	UPTD Terminal Tipe B	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	6 Orang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Kebijakan nasional terkait urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber
A	Keselamatan dan Keamanan	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi	
	2. Sasaran menurunnya Jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	
B	Pelayanan Transportasi	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	
	2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan	

	kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi	
	4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	
	5. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
	6. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah	
C	Kapasitas Transportasi	
	1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024

	multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda,	
	2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia	
	3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih modal terpadu	
	4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang perhubungan di level pemerintah Provinsi. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang perhubungan antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien. Kementerian Perhubungan menetapkan lima program prioritas yakni

pembangunan konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah terpencil, perbatasan, Ibu Kota Negara Baru serta pengembangan SDM. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal). Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah diakomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kalimantan Selatan

Visi pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2025 - 2029 yaitu: "KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia
2. Pembangunan infrastruktur yang handal
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan syariah
4. Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim
5. Tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat

Dalam rangka mewujudkan misi-misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari misi, adapun urusan Perhubungan ditetapkan pada misi kedua dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi Kedua : Pembangunan Infrastruktur Yang Handal

Tujuan adalah Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk pemerataan pembangunan, dengan sasaran adalah Meningkatkan Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah dengan indikator kinerja adalah Indeks Infrastruktur Dasar.

Penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan penyelarasan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada periode tahun 2025-2029. Selain itu, rumusan arah kebijakan pembangunan yang dipilih merupakan upaya untuk mengimplementasikan janji dan program prioritas kepala daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Perhubungan adalah sebagai berikut:

Misi 2: Pembangunan Infrastruktur Yang Handal

Tujuan : Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk pemerataan Pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Sistem transportasi yang handal, aman nyaman dan selamat, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang handal (memiliki kemampuan pelayanan aksesibilitas yang tinggi dan tepat waktu), aman (*security*), nyaman (*comfortable*), selamat (*safety*), dan mampu mengembangkan informasi dan teknologi yang dapat diterima oleh masyarakat secara positif. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan adalah **“Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dengan penyediaan infratraktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan”**

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan
3	Meningkatkan keselamatan Transportasi
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam bagian mengenai strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, maka program yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian
4. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 berdasarkan rencana program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian
- Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Program Pengelolaan Pelayaran
- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional

- Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
- Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan UPTD Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan Tahun 2026 berdasarkan rencana program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian Visi dan misi kepala daerah
- b. Pencapaian NSPK dan SPM perhubungan

Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2026, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan

Jumlah Program = 4 Program
Jumlah Kegiatan = 24 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan = 65 Sub Kegiatan

b. UPTD Terminal Tipe B

Jumlah Program = 2 Program
Jumlah Kegiatan = 7 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan = 17 Sub Kegiatan

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci Dinas Perhubungan sejumlah Rp 181.845.579.384 dan UPTD Terminal Tipe B Sejumlah Rp 8.172.347.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Renja) dalam dokumen RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas daerah. Renja ini berisi perencanaan anggaran, sumber pendanaan, serta indikator capaian yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Pendanaan dalam Renja mencakup sumber-sumber seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta potensi pendanaan lainnya dari pemerintahan pusat maupun sektor swasta.

Pada tahun 2026, Dinas Perhubungan mengusulkan anggaran sebesar Rp. 79.595.873.898,00 sedangkan UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan mengusulkan sebesar Rp. 4.901.142.000,00.

Adapun rincian pagu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per program yang akan ditampilkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Sebesar Rp. 25.863.118.058,00.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Sebesar Rp. 51.980.130.040,00.
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian
Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Sebesar Rp. 24.900.000,00.
4. Program Pengelolaan Pelayaran
Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Sebesar Rp. 1.727.725.800,00.

Adapun rincian pagu UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan per program yang akan ditampilkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Sebesar Rp. 1.417.060.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Sebesar Rp. 3.484.082.000,00.

Tabel 4.1
Target capaian Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, dan Indikator Program
Tahun 2026

No	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Target
Tujuan			
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	Rasio Konektivitas	0.66%
Sasaran			
1	Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Trasanportasi	95,1
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95,1
		Indeks Pelayanan Publik	4,1
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90,2
		Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3,09
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dicangankan	2	
Program			
1	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT	Persentase Kegiatan Tepat Waktu	100%
		Persentase Laporan/Telahaan Staf Tepat Waktu	100%
		Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	100
		Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang di tindak lanjuti	100%
		Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap layanan Sekretariat	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT	80%
		Nilai Pendapatan UPT	120.000.000
2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat	0,63%

3	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air	0,62%
4	Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100%

Tabel 4.2
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat

Dinas Perhubungan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)
DINAS PERHUBUNGAN								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Rp. 51.980.130.040,00
2	15	02	1,01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			Rp. 50.000.000,00
2	15	02	1,01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00

2	15	02	1,01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			Rp. 9.590.000.000,00
2	15	02	1,02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.000.000,00
2	15	02	1,02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 6.964.550.000,00

2	15	02	1,02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.000.000,00
2	15	02	1,02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekengapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.125.450.000,00
2	15	02	1,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			Rp. 1.069.878.500,00

2	15	02	1,05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 75.000.000,00
2	15	02	1,05	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00
2	15	02	1,05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 769.978.500,00
2	15	02	1,05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 75.000.000,00
2	15	02	1,05	0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.900.000,00
2	15	02	1,06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan			Rp. 70.000.000,00

					Provinsi			
2	15	02	1,06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 45.000.000,00
2	15	02	1,06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Rp. 576.999.800,00
2	15	02	1,07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 29.999.800,00
2	15	02	1,07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,07	0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua	Rp. 25.000.000,00

							Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	15	02	1,07	0010	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.000.000,00
2	15	02	1,07	0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 465.000.000,00
2	15	02	1,07	0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 40.050.000.140,00
2	15	02	1,08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00

2	15	02	1,08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 40.000.000.140,00
2	15	02	1,09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 49.888.000,00
2	15	02	1,09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.888.000,00
2	15	02	1,10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 74.877.000,00

2	15	02	1,10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.888.000,00
2	15	02	1,10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.992.000,00
2	15	02	1,10	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.997.000,00
2	15	02	1,12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 49.888.000,00
2	15	02	1,12	0003	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.888.000,00

2	15	02	1,12	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 128.598.800,00
2	15	02	1,13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 103.598.800,00
2	15	02	1,14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 169.999.800,00
2	15	02	1,14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 169.999.800,00

2	15	02	1,15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 75.000.000,00
2	15	02	1,15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,15	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	02	1,15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Rp. 1.727.725.800,00
2	15	03	1,02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			Rp. 50.000.000,00

2	15	03	1,02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00
2	15	03	1,05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 49.999.900,00
2	15	03	1,05	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 49.999.900,00
2	15	03	1,06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			Rp. 100.051.100,00
2	15	03	1,06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.051.100,00

2	15	03	1,10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 1.527.674.800,00
2	15	03	1,10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.168.848.000,00
2	15	03	1,10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 358.826.800,00
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			Rp. 24.900.000,00
2	15	05	1,03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 24.900.000,00
2	15	05	1,03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 24.900.000,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 25.863.118.058,00
2	15	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 891.512.800,00

2	15	01	1,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 279.112.800,00
2	15	01	1,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	01	1,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	01	1,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00
2	15	01	1,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00

2	15	01	1,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 60.000.000,00
2	15	01	1,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 252.400.000,00
2	15	01	1,01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000,00

2	15	01	1,01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000,00
2	15	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 15.290.000.000,00
2	15	01	1,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000.000.000,00
2	15	01	1,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 240.000.000,00
2	15	01	1,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00

2	15	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp. 200.000.000,00
2	15	01	1,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000,00
2	15	01	1,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.000,00
2	15	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 125.820.000,00

2	15	01	1,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 75.875.000,00
2	15	01	1,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 49.945.000,00
2	15	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 4.252.678.700,00
2	15	01	1,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 19.990.400,00
2	15	01	1,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 22.996.000,00

2	15	01	1,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.299.991.300,00
2	15	01	1,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.000.000,00
2	15	01	1,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 12.000.000,00

2	15	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.	Rp. 818.957.000,00
---	----	----	------	------	--	------------------------------	--	--------------------

							Tabalong, Semua Kecamatan,	
							Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	15	01	1,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 58.744.000,00
2	15	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 115.000.000,00
2	15	01	1,07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.000.000,00
2	15	01	1,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 85.000.000,00
2	15	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 3.024.944.558,00

2	15	01	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.074.999.858,00
2	15	01	1,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.949.944.700,00
2	15	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 1.963.162.000,00
2	15	01	1,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.581.566.000,00
2	15	01	1,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 381.596.000,00
Jumlah								Rp. 79.595.873.898,00

UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)
UPTD TERMINAL TIPE B DAN TRANS PERKOTAAN								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Rp. 1.417.060.000,00
2	15	02	1,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			Rp. 1.416.560.000,00
2	15	02	1,03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen Kab. Tabalong, Murung Pudak, Mabu'un Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar Kab. Tanah Bumbu, Batu Licin, Kersik Putih	Rp. 1.415.560.000,00
2	15	02	1,03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 500.000,00

2	15	02	1,03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 500.000,00
2	15	02	1,08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 500.000,00
2	15	02	1,08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 500.000,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 3.484.082.000,00
2	15	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 88.410.000,00
2	15	01	1,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 79.760.000,00
2	15	01	1,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 8.650.000,00
2	15	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 36.000.000,00
2	15	01	1,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 36.000.000,00
2	15	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 369.394.400,00
2	15	01	1,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus	Rp. 34.141.500,00

							Luar	
2	15	01	1,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 38.172.900,00
2	15	01	1,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 18.232.000,00
2	15	01	1,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 3.000.000,00
2	15	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen Kab. Tabalong, Murung Pudak, Mabu'un Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar Kab. Tanah Bumbu, Batu Licin, Kersik Putih	Rp. 275.848.000,00
2	15	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 122.000.000,00
2	15	01	1,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 62.000.000,00

2	15	01	1,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 60.000.000,00
2	15	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 2.642.567.600,00
2	15	01	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 162.000.000,00
2	15	01	1,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari Kab. Kotabaru, Pulaulaut Utara, Stagen Kab. Tabalong, Murung Pudak, Mabu'un Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar Kab. Tanah Bumbu, Batu Licin, Kersik Putih	Rp. 2.480.567.600,00
2	15	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 225.710.000,00
2	15	01	1,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 91.560.000,00
2	15	01	1,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	Rp. 21.650.000,00
2	15	01	1,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus	Rp. 112.500.000,00

							Luar		
								Jumlah	Rp. 4.901.142.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Program dan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 serta dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2026.